



## **Judul: Anggota parlemen berjanji untuk melindungi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan memerangi maraknya hasutan kebencian**

Anggota parlemen dan pemuka agama dari Indonesia menandatangani “Deklarasi Sentul untuk Pembangunan Perdamaian dan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB)”. Deklarasi tersebut merupakan komitmen moral untuk mempromosikan dan memperkuat perlindungan KBB untuk semua individu dan untuk melawan munculnya hasutan kebencian di Jawa Barat.

"Seperti yang kerap terjadi di regional Asia Tenggara, narasi kebencian memiliki dampak yang berbahaya bagi masyarakat, dan minoritaslah yang kerap tertimpa dampak terparah, termasuk perempuan," ujar KH Maman Imanul Haq, anggota parlemen dari Indonesia. "Narasi kebencian merupakan ancaman besar bagi tatanan masyarakat demokratis, karena narasi tersebut membungkam wacana dan debat terbuka, meningkatkan ketegangan antar komunitas, dan menghasut diskriminasi, permusuhan dan kekerasan."

"Sebagai anggota parlemen, kita memiliki peran penting dalam memerangi narasi kebencian, termasuk dengan mengintensifkan kolaborasi antaragama dan antarlembaga di berbagai tingkat dan mengintegrasikan perspektif damai dan agenda KBB dalam kegiatan reses dan pertemuan publik kita", ujar Eva Kusuma Sundari, anggota Kehormatan APHR.

Anggota parlemen dan pemuka agama sepakat untuk mengintegrasikan KBB ke dalam proses representasi, legislasi dan pengawasan di badan legislatif Jawa Barat.



**SEAPFoRB**  
Southeast Asia Parliamentarians  
for Freedom of Religion or Belief



International Panel of  
Parliamentarians  
for Freedom of Religion  
or Belief



Seruan tersebut dihimbau setelah dilaksanakannya lokakarya pelatihan yang diadakan pada 27 Mei 2021 bagi anggota parlemen terkait strategi melawan munculnya ujaran kebencian terhadap minoritas agama. Acara ini diselenggarakan oleh Southeast Asian Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief (SEAPFoRB), sebuah kelompok kerja yang dibentuk di bawah proyek bersama KBB yang diusung oleh ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) dan International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief. (IPPFoRB).

Lokakarya ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada anggota parlemen terkait inisiatif yang ada yang dapat membantu melawan hasutan kebencian, serta strategi yang dapat mereka gunakan untuk memerangi narasi kebencian, terutama dalam konteks Jawa Barat, Indonesia. Seperti dilansir oleh Setara Institute, Jawa Barat secara konsisten menduduki peringkat tertinggi dalam kasus intoleransi agama di Indonesia.

Akibat karantina yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, banyak wacana yang terdigitalisasi, dan karenanya, acara ini juga mengundang para ahli dan praktisi di lapangan untuk membahas strategi kampanye untuk mengkaunter narasi kebencian daring dengan memperkuat pesan positif dan mengintensifkan dialog dan kegiatan promosi melalui berbagai platform media sosial.

"Dalam dunia kita yang semakin digital, yang semakin diperburuk oleh krisis kesehatan, kita melihat banyak dari narasi kebencian ini mendapatkan lebih banyak daya tarik online. Dan kita juga telah melihat pemerintah dan politisi mengeksploitasi ketakutan terkait COVID-19 untuk mengkambinghitamkan minoritas. Kita semua memiliki peran dalam mengkaunter hasutan kebencian ini," pungkas Eva Kusuma Sundari.

